



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 555.10 / 1294 / Diskominfo stand /

TENTANG

**PEMANFAATAN APLIKASI PATRIOT SINGLE WINDOW SEBAGAI SATU
APLIKASI MOBILE UNTUK PUSAT LAYANAN DAN INFORMASI
KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas kerja pengelolaan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju tata pemerintahan yang baik berbasis TIK, maka perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah yang dimaksud pada huruf a, perlu memanfaatkan Aplikasi Patriot Single Window sebagai Satu Aplikasi *Mobile* untuk Pusat Layanan dan Informasi Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah kota Bekasi;

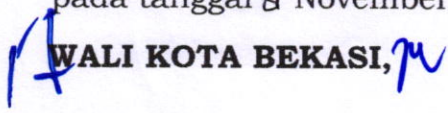
Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 555/Kep-147-Diskominfostandi/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis e-Government Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

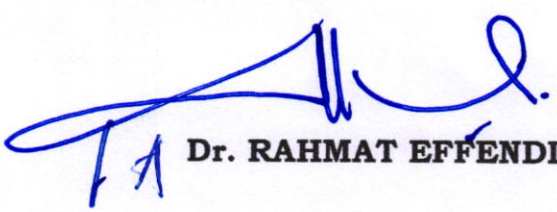
MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Perangkat Daerah agar :
1. mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemennya pada Aplikasi Patriot Single Window;
 2. melakukan pemetaan data dan informasi strategis sesuai urusan kewenangannya yang akan diintegrasikan pada Aplikasi Patriot Single Window sebagaimana format (terlampir);
 3. membentuk pengelola data dan informasi strategis yang berkewajiban melakukan pembaruan data (*update data*) secara berkelanjutan;
- KEDUA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian agar melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Aplikasi Patriot Single Window Kota Bekasi sebagai Satu Aplikasi *Mobile* untuk Pusat Layanan dan Informasi Kota secara berkelanjutan;

Instruksi Wali Kota ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 November 2021


WALI KOTA BEKASI,


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG PEMANFAATAN APLIKASI PATRIOT SINGLE WINDOW SEBAGAI SATU APLIKASI MOBILE UNTUK PUSAT LAYANAN DAN INFORMASI KOTA BEKASI

NO	URUSAN	INTEGRASI		API / FORMAT LAPORAN	PENGGUNA PUBLIK / INTERNAL	OPD
1.	KESEHATAN	1	Data Sebaran Covid-19		Publik	Dinkes, RSUD, Diskominfostandi
			a. Dalam Perawatan			
			b. Sembuh			
			c. Meninggal			
			d. Sebaran per-Kecamatan			
		2	Data Penyakit		Publik	Dinkes, RSUD
			a. Sebaran Jumlah Penyakit berdasarkan jenis penyakit			
			b. Data Sebaran Rumah Sakit			
			c. Data Sebaran Puskesmas			
			d. Jumlah Pasien			
2.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	1	Data Kegiatan Perangkat Daerah		Publik	Diskominfostandi, Bagian Hukum Setda
			a. Data Kegiatan Harian			
		2	Data Analitik Media Sosial		Internal	
			a. Tren Analitik Medsos			
		3	Data Sebaran Wifi		Publik	
			a. Peta Sebaran			
		4	JDIH		Publik	
			a. Produk Hukum			
		5	e-office		Internal	
			a. TNDE			

NO	URUSAN	INTEGRASI		API / FORMAT LAPORAN	PENGGUNA PUBLIK / INTERNAL	OPD
		6	CCTV		Publik	
			a. Akses Sebaran CCTV			
3.	PENANAMAN MODAL	1	Data Perizinan/ Non Perizinan PTSP		Publik	DPMPTSP
			a. Data Perizinan/ Non Perizinan Kecamatan			
		2	Data Perizinan/Non Perizinan Kecamatan		Publik	Diskominfostandi (Sipaten)
		3	Data Realisasi Pajak		Internal	Bapenda
			a. Realisasi PBB			
			b. Realisasi BPHT			
		4	Data Pendapatan Restribusi		Internal	
			a. Jasa Umum			
			b. Jasa Usaha			
4.	KEPENDUDUKAN DAN SIPIL	1	a. Perizinan tertentu Data Kependudukan		Publik dan/atau Internal	Disdukcapil
			b. Data Hasil Layanan			
			c. Data Agregasi Kependudukan			
			d. Data Administrasi Kependudukan			
			e. Data Kelurahan			
			f. Data Kecamatan			
			g. Data Jumlah Penduduk			
5.	PARIWISATA/ KEBUDAYAAN	1	Data Hotel		Publik	Disparbud
			a. Jumlah Kunjungan Hotel			
			b. Jumlah Hotel			
		2	Data Destinasi Wisata			
			a. Destinasi alam, buatan, budaya			

NO	URUSAN	INTEGRASI		API / FORMAT LAPORAN	PENGGUNA PUBLIK / INTERNAL	OPD
		3	Data Sanggar			
			a. Sebaran Sanggar Per kecamatan			
			b. Jenis Kesehatan			
		4	Data Situs Budaya			
		5	Data Makanan Tradisional			
		6	Data Hiburan			
		7	Data Restoran			
		8	Data Event			
6.	SOSIAL	1	Data DTKS		Publik	Dinsos
			a. Data Kemiskinan			
			b. Penerima KIP			
			c. Penerima Bantuan Sosial			
		2	Data Lansia			
7.	TENAGA KERJA	1	Data Tenaga Kerja		Publik	Disnaker
			a. Jumlah Kartu AK1			
			b. Penerima KIP			
		2	Data Penempatan Kerja		Internal	
			a. Jumlah Pencari Kerja		Publik	
			b. Jumlah Lowongan Pekerja		Publik	
			c. Jobfair		Publik	
8.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1	Data Limbah Dosmetik		Publik / Internal	Disperkimtan
			a. Jumlah Pelayanan Air Limbah			
			b. Jumlah Pelanggan			
			c. Tarif Pelayanan			
		2	Data Perumahan dan Permukiman			

NO	URUSAN	INTEGRASI		API / FORMAT LAPORAN	PENGGUNA PUBLIK / INTERNAL	OPD
9.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Data PKL		Internal	Dinas Koperasi & UMKM / Dsikominfostandi
			a. Alamat/ lokasi Usaha			
			b. Komoditi dan Produk			
			c. Kepemilikan TDU			
			d. Berdasarkan Pembagian Zona			
		2	Data UMKM			
			a. Data Pelaku Usaha			
10.	PENDIDIKAN	1	Data Pendidikan		Publik	Disdik
			a. Nama Satuan Pendidikan			
			b. NPSN			
			c. Bentuk Pendidikan			
			d. Status Sekolah			
			e. Alamat			
			f. Kelurahan			
			g. Kecamatan			
			h. Lintang Timur			
			i. TMT Akreditasi			
			j. Akreditasi			
11.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Data Tata Ruang Kota		Internal	Distaru
			a. Data Pola dan Struktur Ruang Kota Bekasi			
			b. Data Peraturan Zonasi dan Intesitas Ruang Kota Bekasi			
			c. Regulasi Terkait			
		2	Data Tata Ruang Kota			
			a. Data Keterangan Rencana Kota			
			b. Data Rencana Tapak			
			c. Data Rekomtek IMB			

NO	URUSAN	INTEGRASI		API / FORMAT LAPORAN	PENGUNA PUBLIK / INTERNAL	OPD
			d. Data SLF			
			e. Data PSU			
			f. Data TKPRD			
		3	Data Tata Ruang Kota		Publik	
			a. Data Rencana Tapak Dengan Luas > 2000 m2			
			b. Data Masterplan Drainase			
		2	Data Binamarga / SDA		Publik	
3	Data PJU		Internal	DKPP		
12.	PANGAN	1	Data Peternakan dan Kesehatan Hewan			Publik
			a. Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan			
			b. Rekomendasi Izin Karantina Hewan Sementara			
			c. Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan			
		2	Data Kebutuhan Pokok		Publik	Disdagperin
3	Data Pasar					
13.	KEPEGAWAIAN	1	Data ASN		Publik / Internal	BKPPD
			a. Data ASN Kota Bekasi			
			b. Statistik ASN Kota Bekasi			

WALI KOTA BEKASI, *rw*

Dr. RAHMAT EFFENDI